

## Use of Village Funds in the Accelerated Convergence Program for Stunting Prevention

Nur Hendriyanto<sup>1\*</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>

FHISIP, Universitas Terbuka

**Corresponding Author:** Nur Hendriyanto [nurhendriyanto80@gmail.com](mailto:nurhendriyanto80@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Convergence, Stunting, Village Funds

*Received :* 02 October

*Revised :* 22 October

*Accepted:* 25 November

©2023 Hendriyanto, Prakoso:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research aims to provide an overview (description) and analyze several Village Fund programs related to stunting prevention and the extent of the success rate of the impact of using Village Funds on reducing rates of malnutrition and stunting in Ketitanglor Village. Research technique in the form of a literature review study of several appropriate articles, Regulations of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, APBD desa Ketitanglor, Bojong District, Pekalongan Regency and qualitative analysis. Based on the research results of several articles, it shows that stunting convergence must receive serious attention from the lower level of government, namely the village. The Central Government must provide clear regulations and a legal umbrella regarding the use of Village Funds for accelerated convergence in stunting prevention in villages. It can be concluded that stunting convergence must be carried out in an organized, coordinated manner and involve all elements, including health workers, village stakeholders including community leaders, social religious institutions, non-governmental organizations and also village government, supra-village government at the sub-district, district/city level and Provinces and Central Government.

---

## Penggunaan Dana Desa dalam Program Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting

Nur Hendriyanto<sup>1\*</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>

FHISIP, Universitas Terbuka

**Corresponding Author:** Nur Hendriyanto [nurhendriyanto80@gmail.com](mailto:nurhendriyanto80@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Konvergensi Stunting, Dana Desa (DD)

*Received :* 02 Oktober

*Revised :* 22 Oktober

*Accepted:* 25 November

©2023 Hendriyanto, Prakoso:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran (diskripsi) dan menganalisa beberapa program Dana Desa yang berkaitan dengan pencegahan stunting dan sejauh mana tingkat keberhasilan dari dampak penggunaan Dana Desa ini pada penurunan angka gizi buruk maupun stunting di Desa Ketitanglor. Teknik Penelitian berupa studi literature review dari beberapa artikel-artikel yang sesuai, Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, APBD desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan menganalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian beberapa artikel menunjukkan bahwa konvergensi stunting harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan tingkat bawah yaitu desa. Pemerintah Pusat harus memberikan regulasi yang jelas dan payung hukum terkait penggunaan Dana Desa bagi konvergensi percepatan pencegahan stunting di desa. Dapat disimpulkan bahwa konvergensi stunting harus dilakukan secara terorganisir, terkoordinir dan melibatkan seluruh elemen baik Tenaga Kesehatan, stakeholder didesa baik dari tokoh masyarakat, Lembaga sosial keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga Pemerintahan Desa, Pemerintah Supradesa di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Pemerintahan Pusat.

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang kompleks dan menyeluruh dalam segala bidang yang ditujukan pada tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tidak hanya memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur fisik semata, namun harus dapat memacu peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul sebagai aktor penggerak utama pembangunan agar berjalan selaras dan berkesinambungan. Guna tercapainya Pembangunan SDM yang unggul dan berkualitas harus pula ditunjang dengan peningkatan kesehatan, mutu pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Dukungan penganggaran dengan alokasi dana yang ideal dan memadai dalam APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di desa harus berjalan secara sinergis. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, program peningkatan kesehatan dilaksanakan melalui empat program utama yaitu: penurunan angka kematian pada ibu dan bayi (AKIB), penurunan angka resiko stunting pada balita, pencegahan penyebaran penyakit menular serta penurunan angka penderita penyakit tidak menular. Program peningkatan gizi pada masyarakat ini diharapkan dapat menurunkan angka resiko stunting pada balita.

Hal ini menjadi prioritas utama atau sasaran pokok dalam pembangunan nasional Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menindaklanjuti program penurunan angka resiko stunting pada balita yang dicanangkan Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa, yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas PMD memberikan porsi penggunaan Dana Desa guna pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan stunting ditingkat desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan secara nasional (negara) merupakan pembangunan yang kompleks dan menyeluruh dalam segala bidang yang ditujukan pada tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tidak hanya memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur fisik semata, namun harus dapat memacu peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul sebagai aktor penggerak utama pembangunan agar berjalan selaras dan berkesinambungan. Guna tercapainya Pembangunan SDM yang unggul dan berkualitas harus pula ditunjang dengan peningkatan kesehatan, mutu pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Dukungan penganggaran dengan alokasi dana yang ideal dan memadai dalam APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di desa harus berjalan secara sinergis.

Sejak tahun 2018 hingga sekarang, program peningkatan kesehatan dilaksanakan melalui empat program utama yaitu: menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi (AKIB), penurunan angka resiko stunting pada balita, pencegahan penyebaran penyakit menular serta penurunan angka penderita penyakit tidak menular. Program peningkatan gizi pada masyarakat ini

diharapkan dapat menurunkan angka resiko stunting pada balita. Hal ini menjadi prioritas utama atau sasaran pokok dalam pembangunan nasional Indonesia (Kemenkes RI, 2018).

Stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan yang terjadi pada bayi dan balita (pertumbuhan fisik dan otak) sebagai akibat kurang gizi dalam waktu lama. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan juga memiliki cara berpikir yang cenderung autis. Kekurangan gizi ini dialami sejak janin dalam kandungan sampai 1000 Hari Pertama Kelahiran. (Kemenkes RI, 2018)

Stunting memberikan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental (autis), rendahnya kemampuan akademis, dan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, kelebihan kadar gula darah (diabetes), hingga over pertumbuhan.

Guna percepatan pencegahan stunting ini, bagaimana peran Pemerintah Desa?

1. Dalam membantu pemantauan dan pemenuhan gizi pada ibu hamil dari keluarga prasejahtera atau miskin?
2. Siapakah yang dapat memberikan pendidikan pengasuhan bayi dan balita?
3. Perlukah kelas pengasuhan/parenting dilakukan di setiap dusun atau desa, untuk menambah pengetahuan tentang pengasuhan, kesehatan serta menangkal mitos-mitos yang salah dalam pengasuhan bayi dan balita?
4. Jika diperlukan kelas parenting ini, darimana anggaran pelaksanaan diperoleh?
5. Bagaimana langkah yang diambil Pemerintah Desa untuk menciptakan lingkungan desa agar sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik, sehat dan ramah lingkungan.

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi :

- a. Program-program desa lebih mengena dalam usaha konvergensi stunting terutama menyasar pada kelompok keluarga pra sejahtera dan miskin.
- b. Memantapkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya Camat, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Puskesmas dalam penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam program-program konvergensi stunting.
- c. Memperoleh pengalaman dalam melaksanakan pelayanan di pos kesehatan, posyandu sesuai tuntunan ilmu kesehatan dan memiliki referensi program bagi kemajuan di desa karena kebetulan peneliti seorang Perangkat Desa.

## **METODOLOGI**

Data yang diambil pada paper ini berasal dari hasil penimbangan balita, jumlah kehadiran ibu hamil untuk pengecekan kehamilan, kehadiran kelas parenting di Posyandu Melati 1, Melati 2 dan Melati 3 di Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Metode Penelitian berupa analisa dampak peng-alokasian dana konvergensi stunting dalam APBDesa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan serta pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM), sehingga memberikan gambaran (diskripsi) dan analisa beberapa program Dana Desa, dan sejauh mana tingkat keberhasilan dari dampak penggunaan Dana Desa ini pada penurunan angka gizi buruk maupun stunting di Desa Ketitanglor.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, untuk kegiatannya didanai dari Dana Desa, dan setiap tahunnya masuk dalam penganggaran APBDesa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

KPM memiliki tugas, antara lain:

- Mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang program konvergensi pencegahan stunting, termasuk memperkenalkan alat pengukuran panjang/tinggi badan Baduta yakni tikar pertumbuhan sebagai alat deteksi dari stunting.
- Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 HPH
- Melakukan pantauan pada sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan berkualitas.
- Memfasilitasi kegiatan konseling gizi, kelas ibu hamil, kelas pengasuhan di desa.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama antar pihak yang meliputi Bidan Desa, Petugas Puskesmas (Ahli gizi, sanitasi), guru Paud dan pemerintahan di desa.
- Memberikan rancangan kebutuhan anggaran untuk kegiatan pencegahan stunting di desa, agar Pemerintah Desa mengalokasikannya dalam APBDesa yang disesuaikan dengan prosentase ideal yang ditetapkan oleh Dinas PMD, dalam penggunaan Dana Desa untuk konvergensi pencegahan stunting.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan menganalisa beberapa program konvergensi pencegahan stunting di Desa Ketitanglor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konvergensi *stunting* diawali pada pemberian edukasi pada masyarakat tentang usia pernikahan, edukasi pada calon pengantin, edukasi pada saat kehamilan, edukasi pengasuhan bayi dan balita, yang mana untuk tingkat desa diperlukan kerjasama lintas sector yakni Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh lembaga kemasyarakatan (BPD, LKM, LPMD), guru dan pendidik PAUD/TK dan segenap elemen desa lainnya.
- b. Tata cara pengasuhan bayi dan balita seperti batas usia pemberian makanan tambahan ASI yang diberikan pada balita, harus mendapatkan pengetahuan yang benar dari ahli gizi yang didapat dari kelas pengasuhan maupun konseling saat pemeriksaan di Posyandu.

- c. Pengalokasian Dana Desa maupun penganggaran lainnya yang ada di desa guna konvergensi pencegahan stunting dapat dioptimalkan dengan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan dari Puskesmas dan telah mendapat persetujuan dari desk APBDes tingkat Kecamatan.
- d. Pemerintah Desa menyiapkan anggaran guna mendukung program konvergensi stunting baik yang bersumber dari Dana Desa maupun dana-dana lainnya yang ada di desa, sesuai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang benar sesuai Peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan termuat dalam Peraturan Desa.
- e. Program-program yang dijalankan terlebih dahulu direncanakan oleh Kader KPM dan selanjutnya dijalankan oleh kader-kader Posyandu, PKK, Posbindu, Kader Parenting dan kader-kader lainnya, dan dikoordinir dan dipantau pelaksanaannya oleh kader KPM. Dan Kader KPM ini langsung bertanggung jawab pada tugasnya kepada Kepala Desa.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Almatsier. (2011). *Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan*. Gramedia.

Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan*. 3.

Fitri, I., & Wiji, R. N. (2019). *Buku Ajar GIZI REPRODUKSI DAN BUKTI*. Gosyen Publishing.

Hanindita, M. (2019). *MommyClopedia 567 Fakta Tentang MPASI*. PT Gramedia Pustaka Utama.

<https://yankes.kemkes.go.id>

Kartikasari, D., & Afsah, Y. R. (2019). *A-Z tentang MPASI*. Laksana.

Kurniati, P. T., & Sunarti. (2020). *Stunting dan Pencegahannya*. Penebit Lakeisha.  
Mardiyantoro, N. (2019). *Metodologi Penelitian*. Elearning FASTIKOM.

MenDes, PDT (2016:22). Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 (2020). *Penurunan Stunting di Kabupaten Pekalongan*.

Peraturan Desa Ketitanglor Nomor 4 (2022). APBDes Ketitanglor guna *Penurunan Stunting di desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan*.